

**KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN;
Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang¹**

**(GENDER INEQUALITY IN EDUCATION ; Study of women condition in District
Majalaya, Municipality Karawang)**

Rahmi Fitrianti² & Habibullah³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ketidaksetaraan dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan di Majalaya - Karawang yang disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai terhadap pendidikan. Faktor penting yang mendorong terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah nilai. Nilai yang ada membentuk stereotip negatif yang menyebabkan terjadinya marginalisasi, subordinasi dan beban kerja pada perempuan di Kecamatan Majalaya.

Kata kunci: Ketidaksetaraan gender, pendidikan, perempuan

Abstract

This research discusses gender inequality in education in Majalaya district, Karawang, West Java, by using an explanative qualitative approach. The result of the study shows that there is a gender inequality in women education influenced by the access, participation, control, benefits and value in the community. Value plays as an important influencing factor that creates gender inequality in education. The existing value in Majalaya district forms a negative stereotype that causes women marginalization, subordination and over-load work.

Keyword: Gender inequality, education, woman

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan karena keberhasilan pembangunan merupakan kontribusi pendidikan yang berkualitas termasuk didalamnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Suryadi & Idris

(2004) latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat.

UUD 1945 mengamanatkan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan.

¹ Artikel ini diangkat dari penelitian tesis Rahmi Fitrianti di Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia dengan judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan (Suatu Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang)

² Rahmi Fitrianti, Staf pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, Alumni Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan Sarjana Psikologi Universitas Padjajaran. email:revaleezza@yahoo.com

³ Habibullah, Peneliti Muda pada Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial RI, Alumni Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan Sarjana Sosial, Jurusan Ilmu Sosiatri (Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) Universitas Gadjah Mada. email:habibullah792002@yahoo.com

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, dalam pasal 48: “wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada akses terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang berupah rendah. Selain itu pengaruh pendidikan memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan (Suryadi & Idris, 2004). Selanjutnya menurut Suryadi (2001) rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan akan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar dalam pembangunan.

Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan dibidang ekonomi, sosial dan politik (Suryadi, 2001). Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Perempuan yang berpendidikan tinggi mampu membuat keluarganya lebih sehat dan memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anaknya. Selain itu perempuan berpendidikan tinggi

memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya rendah akan lebih rentan terhadap tindak kekerasan (fisik maupun non fisik), dan memiliki tingkat kesehatan dan ekonomi yang cenderung lebih rendah (Supiandi, 2001).

Berdasarkan data Bappeda dan BPS Kabupaten Karawang (2009) di Kabupaten Karawang terdapat 13,60 persen penduduk perempuan masih buta huruf sedangkan hanya 5,08 persen penduduk laki-laki mengalami buta huruf. Hal ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Karawang buta huruf masih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Data Bappeda dan BPS Kabupaten Karawang (2009) menunjukkan sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke-atas di Kabupaten Karawang yang tidak mempunyai ijazah minimal SD yaitu sebanyak 30,21 persen (454.842 jiwa), dari jumlah tersebut kebanyakan perempuan yaitu 56,94 persen .

Pada tahun 2008, di Kabupaten Karawang terdapat 167 desa tidak mempunyai sarana pendidikan SMP, dan 72 desa diantaranya, bila penduduknya yang ingin bersekolah ke SMP terdekat harus menempuh perjalanan lebih dari 3 km. Untuk jenjang pendidikan lebih tinggi ada kurang lebih 266 desa tidak mempunyai sarana pendidikan SMA bila penduduknya ingin bersekolah ke SMA terdekat akan menyebabkan biaya transport lebih tinggi dari biaya pokok pendidikannya itu sendiri (Bappeda dan BPS Kabupaten Karawang, 2009).

Beberapa penelitian menyatakan ketidaksetaraan gender disebabkan karena akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya (Mosse, 1996). Menurut Suleeman (1995) alasan ketimpangan gender dalam pendidikan disebabkan ketersediaan

fasilitas, mahal biaya sekolah, dan investasi dalam pendidikan. Van Bemmelen (2003) menemukan bahwa ketimpangan gender meliputi akses perempuan dalam pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, nilai gender yang ditanamkan oleh guru dan kebijakan yang bias gender.

Namun dari banyaknya penelitian mengenai gender tersebut, belum banyak yang mencoba untuk menghubungkan pengaruh faktor-faktor ketidaksetaraan gender tersebut. Penelitian ini mencoba menghubungkan faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yakni akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai mempengaruhi terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1). Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Karawang? 2). Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Kabupaten Karawang?

Sejalan dengan permasalahan penelitian diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Menggambarkan faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Karawang, 2). Menganalisa faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kabupaten Karawang.

Sedangkan manfaat penelitian ini dengan diketahuinya pengaruh faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan gender kabupaten Karawang untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut

sehingga terciptanya kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang tepat pada penelitian ini karena membutuhkan data yang lebih mendalam mengenai ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai topik dan memiliki gambaran yang lebih jelas.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Pertimbangan pemilihan Kabupaten Karawang menjadi lokasi penelitian karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang ditemukan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dengan keadaan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menggunakan informan yang terpilih benar-benar menguasai permasalahan, yakni dapat menceritakan pengalaman mengenai akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai saat menempuh pendidikan, sehingga diperoleh data unsur akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai mempengaruhi ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan agar informan yang terpilih benar-benar menguasai permasalahan.

Oleh karena itu, kriteria informan yang dipakai yaitu: 1). Wanita yang berusia 30 - 40 tahun, karena untuk usia tersebut pemerintah sudah mulai menggalakan program wajib belajar, 2). Menikah dan memiliki anak, untuk melihat nilai yang dianut dalam keluarganya, 3). Mempunyai saudara laki-laki untuk melihat apakah adanya perbedaan perlakuan orang tua dalam partisipasi pendidikan di sekolah formal

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik: studi literatur, *In-depth Interview*, dan Observasi. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas penelitian kualitatif maka digunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek antara data yang satu dengan data yang lainnya. Data yang dimaksudkan antara lain berasal dari hasil wawancara dengan observasi dan data sekunder. Dengan kata lain, triangulasi ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang didapat atau untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai data dan informasi.

Pengertian Gender

Menurut Unger & Crawford (1992) gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki yang dikonstruksi secara sosial bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Hal yang hampir sama dikemukakan Moser (1993) gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi dan kebudayaan. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan secara biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah sementara jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah (Grewal & Kaplan, 2002).

Sementara itu menurut Mosse (1996) gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup, yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya.

Gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan

dominasi dalam struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat (Ostergaard, 1992). Gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup (Bradley, 2007).

Oleh karena itu dapat disimpulkan pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan. Sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya dan psikologis.

Ketidaksetaraan Gender dan Bentuk Ketidaksetaraan

Menurut Nurhaeni (2009) ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif/berbeda yang diterima perempuan atau laki-laki. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan bagi perempuan atau pun laki-laki berdasarkan sistem dan struktur yang ada. Manifestasi yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja (Fakih, 2008). Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya (Moser, 1993).

Pembagian peran, tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin.

Namun apabila pengklasifikasian *feminim* dan *maskulin* digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadi ketidaksetaraan gender.

Manifestasi ketidaksetaraan gender telah terjadi di berbagai tingkatan, bidang dan mengakar dari mulai keyakinan di setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. Salah satu ketidaksetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat adalah bidang pendidikan.

Gender dan Stereotip

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok tertentu. Stereotip yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, yaitu perempuan. Stereotip yang asalnya dari asumsi bahwa perempuan bersolek merupakan upaya memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, stereotip ini menjadi wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan.

Pengertian dan Jenis Pendidikan

Menurut Nasution (2010) Pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang telah distandarisasi dalam jenjang, kurikulum, materi pembelajaran, evaluasi dan dana yang dikeluarkan (Faisal,1991). Pendidikan berkaitan dengan pendidikan formal, yang mengajarkan cara

belajar, pemberian motivasi, dan keterampilan sehingga dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat (Joesoef,1979) .

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita, baik orang terdekat, masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada, baik yang terjadi secara formal maupun nonformal dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan baik yang terjadi selama kita hidup untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik dan mampu menjawab tantangan di masa depan yang bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya.

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan, 2010).

Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Ada 3 hal permasalahan yakni : kesempatan, jenjang dan kurikulum (Suryadi & Idris, 2004). Menurut Suleman (1995) ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam

mengecap pendidikan formal. ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif yakni angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, pilihan bidang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah (Van Bemmelen, 1995).

Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan banyak merugikan perempuan, hal tersebut dapat dilihat, anak perempuan cenderung putus sekolah ketika keuangan keluarga tidak mencukupi, perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga, selain itu pendidikan yang rendah pada perempuan menyebabkan mereka banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan upah rendah.

Faktor-Faktor Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai dan sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan.

Faktor yang menjadi alasan pokok yang penyebab ketidaksetaraan gender menurut Suleman (1995) yaitu: 1). Semakin tinggi tingkat pendidikan formal semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia, 2). Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya untuk bersekolah, 3). Investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah.

Sedangkan faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan menurut Van Bemmelen (2003) meliputi: 1). Akses perempuan dalam pendidikan, 2). Nilai gender yang dianut oleh masyarakat, 3). Nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, 4). Nilai gender yang ditanamkan oleh guru, 5). Kebijakan yang bias gender

Suryadi dan Idris (2004) mengkategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang pendidikan ke dalam 4 aspek yaitu: 1). Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, 2). Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan, 3). Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan, 4). Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal.

Studi yang dilakukan Suryadi (2001) menemukan bahwa pilihan keluarga yang kurang beruntung memberikan prioritas bagi anak laki-laki untuk sekolah dengan alasan biaya, bukan hanya dilandasi oleh pikiran kolot dan tradisional semata, tetapi juga dilandasi dengan pengalaman empirik bahwa tingkat balikan (*rate of return*) terhadap pendidikan perempuan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan antara lain nilai, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Nilai yang berkembang dalam masyarakat yang mengkotak-kotakkan peran laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi stereotip gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kecamatan Majalaya dan Informan Penelitian

Kecamatan Majalaya merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang yang mempunyai 7 desa yaitu desa Pasir Jengkol, Majalaya, Ciranggon, Sarijaya, Bengle, Lemah Mulya dan Pasir Mulya. Luas wilayah kecamatan Majalaya adalah 30,09 km² dengan jumlah penduduk sebesar 43.966 jiwa yang terdiri dari 22.698 laki dan 21.268 jiwa perempuan serta mempunyai kepadatan penduduk 1.461,15 jiwa/km².

Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Majalaya adalah petani. Kepemilikan lahan dikuasai oleh beberapa

orang saja sedangkan yang lainnya hanya sebagai buruh tani

Kecamatan Majalaya belum tersedia Taman Kanak-Kanak dan SLTA sehingga jika anak yang mau sekolah TK dan SLTA harus ke kecamatan lain. Pada tingkat SD tersedia 17 unit Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah murid sebanyak 4.021 orang, 2 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dengan jumlah murid sebanyak 1.053 orang. Pelayanan kesehatan di Kecamatan Majalaya tersedia adalah sebanyak 1 unit Puskesmas, 1 unit Puskesmas Pembantu, dan 16 unit Balai Pengobatan.

Karakteristik informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Karakteristik Informan					
Jenis Kelamin	laki-laki 50%	Perempuan: 50%			
Usia	30 - 35 tahun 56%	36-40 tahun: 22%	40 tahun ke-atas: 22%		
Pendidikan	Tidak lulus SD: 1%	Tamat SD: 22%	Tamat SMP 17%	Tamat SMA 50%	Tamat S1 6%

Jumlah Informan 18 orang

Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan

Akses

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Pada bidang pendidikan kesetaraan terhadap akses yakni keketersediaan sekolah, jarak yang harus ditempuh, biaya serta hambatan di lapangan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses peran-peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan merupakan kondisi yang dihadapi oleh warga Kecamatan Majalaya dalam menyekolahkan anak-anak mereka, serta untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari beberapa informan menyatakan bahwa semenjak mereka masih sekolah dulu sampai dengan sekarang, sarana dan prasarana sekolah masih menjadi kendala di Kecamatan Majalaya. Ketersediaan sarana sekolah mempengaruhi minat para warga desa di Kecamatan Majalaya untuk bersekolah sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Pada masa tersebut, di setiap desa hanya terdapat SD. Sedangkan SMP tidak dimiliki oleh setiap desa, hanya desa tertentu yang memiliki SMP. Dengan demikian, jika penduduk desa setelah lulus SD ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, harus mendaftar ke SMP yang terdapat di desa lain. Perjalanan ke SMP-SMP tersebut membutuhkan waktu antara 30 menit sampai dengan satu jam.

Sementara untuk ketersediaan SMA, terdapat di kecamatan yang lain. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan saat ini, yaitu minimnya ketersediaan sarana sekolah di Kecamatan Majalaya. Jarak yang harus ditempuh menjadi salah satu kendala yang menyebabkan informan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP dan SMA. Faktor jarak antara rumah atau tempat tinggal dengan lokasi sekolah mendapatkan tanggapan berbeda dari para informan. Perbedaannya adalah sebagai berikut: (1) Untuk informan yang bersekolah sampai dengan SD, jarak antara rumah dengan sekolah dirasakan jauh, sehingga menyebabkan mereka enggan untuk berangkat sekolah terutama ketika musim hujan. Apalagi jarak ke SMP yang semakin jauh, menyebabkan mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah; (2) Informan yang lulusan SMP dan SMA menilai jarak bukanlah kendala, meskipun mengakui mereka perlu waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah. Apalagi kondisi jalan yang dilalui menjadi kendala tambahan di musim hujan.

Faktor biaya menjadi pertimbangan utama bagi para informan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Orang tua merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi para informan ketika bersekolah, sehingga ketika tidak ada dukungan biaya dari orangtua maka mereka akan berhenti sekolah. Namun, ada pendapat berbeda mengenai kendala biaya tersebut. Salah seorang informan menyatakan bahwa biaya bukan merupakan kendala, namun faktor malas untuk melanjutkan sekolah lebih menjadi kendala utama, sehingga memilih untuk berhenti.

Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini adalah keikutsertaan perempuan

dalam kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Perempuan selama ini hanya bergerak di sektor domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat kita yang telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan kurang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Faktor pendorong anak perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (sampai dengan SMA) adalah: 1). Dukungan penuh dari orang tua, 2). Keinginan dari dalam diri sendiri, supaya setara dengan teman-teman yang lain, terutama teman pria dalam hal pendidikan, 3). Dalam keluarga semua bersekolah sampai dengan SMA, sehingga anak perempuan pun harus sampai dengan tingkat SMA

Persepsi tentang posisi dan peran anak perempuan dalam keluarga sebagai prioritas kedua setelah anak laki-laki, menyebabkan sebagian anak-anak perempuan di Kecamatan Majalaya, 10 tahun yang lalu banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun secara pribadi memiliki keinginan untuk terus bersekolah, supaya sama dengan teman-teman yang lain (teman pria). Namun pada keluarga yang mampu, ditemukan perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan: Ketika bersekolah dulu, para informan memiliki kewajiban lain yakni membantu para orang tua di rumah dan juga membantu bekerja di sawah. Jadi, anak perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci dan memasak. Sementara, anak laki-laki diberikan pekerjaan lain, bahkan ada yang tidak membantu, hanya bermain-main setiap hari. Bahkan anak perempuan yang SMA pun

tetap harus menjalankan kewajiban membantu ibu mengurus rumah tangga.

Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Kontrol tersebut antara lain dalam keputusan melanjutkan sekolah dan memilih jurusan bagi anak. Kontrol untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan di tanah air, masih sangat didominasi oleh laki-laki.

Ketika memutuskan untuk berhenti sekolah dulu, mayoritas yang mengambil keputusan untuk berhenti adalah para orang tua informan. Selain orang tua, ada juga dari informan sendiri yang memutuskan untuk berhenti sekolah karena berbagai pertimbangan. Seperti berhenti atas permintaan orang tua, dan informan juga berkeinginan untuk bekerja supaya bisa membantu keluarga. Pemilihan jurusan oleh informan yang melanjutkan sampai dengan tingkat SMA dilakukan sendiri, atau dengan kata lain tidak mengikuti kemauan orang tua namun informan tetap membicarakan pemilihan jurusan dengan orang tuanya.

Manfaat

Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal dari pendidikan yang telah ditempuh oleh para informan ketika mereka bersekolah dulu. Untuk melihat faktor manfaat, pada penelitian ini menelaah dari dua aspek yaitu hasil dari pendidikan yang ditempuh serta akibat dari berhenti sekolah. Semua informan menyatakan bahwa mereka memperoleh manfaat dari pendidikan yang telah ditempuh, baik yang hanya sampai dengan SD, SMP maupun SMA.

Dari hasil pendidikan yang diperoleh informan pada masa lalu, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun kepada

keluarga yaitu: (1) Bagi informan yang lulusan SD, manfaat yang dirasakan adalah memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung; (2) Bagi informan yang lulusan SD sampai dengan SMA, memiliki kemampuan untuk mengajar anak-anak mereka membaca dan menulis di rumah; (3) Bagi informan yang lulusan SMP, dengan ijazah SMP yang dimiliki lebih mudah diterima bekerja di pabrik garmen di wilayah Karawang; (4) Bagi informan yang lulusan SMA, lebih mudah diterima bekerja di industri/pabrik, meskipun posisinya tidak bagus. Selain itu, mereka mampu membantu anak-anak di rumah dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

Semua informan menyepakati bahwa dengan berhenti sekolah di masa lalu, baik SD, SMP maupun SMA menimbulkan akibat yang kurang bagus kepada mereka. Para informan yang hanya bersekolah sampai dengan SD, merasa menyesal sekarang karena mereka tidak dapat membantu suami mencari nafkah. Padahal mereka memiliki keinginan untuk bekerja, namun untuk bekerja di kawasan industri seperti buruh pabrik mensyaratkan ijazah minimal SMP. Kalau pun mereka mau bekerja, hanya pekerjaan-pekerjaan kasar yang tersedia, dan itupun lebih mengutamakan laki-laki, seperti di industri mebel dan bengkel. Akibatnya, mereka tetap tidak bisa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, dan hanya mengandalkan suami sebagai pencari nafkah utama.

Nilai

Nilai merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu. Pada penelitian ini nilai yang dianalisis berkaitan dengan tradisi, perbedaan peranan dan posisi perempuan pada masa sekarang di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.

1. Tradisi

Tradisi menikah pada usia muda bagi perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang merupakan faktor yang menjadi pendorong ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Mayoritas orang tua menjodohkan anak perempuan mereka, dan menginginkan supaya anak perempuan menikah secepatnya. Selain karena dorongan orang tua, menikah di usia muda juga disebabkan karena anak perempuan tidak mau ketinggalan untuk segera menikah, supaya setara dengan teman-temannya yang telah menikah terlebih dahulu. Kondisi inilah yang menyebabkan menikah pada usia muda menjadi tradisi semenjak dahulu sampai dengan sekarang di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Bahkan untuk anak perempuan yang mengenyam pendidikan sampai SMA pun, tetap mengikuti tradisi menikah di usia muda. Jadi menikah di usia muda telah menjadi tradisi di desa-desa Kecamatan Majalaya yang dipicu oleh permintaan orang tua serta perasaan malu pada anak perempuan kalau terlambat menikah.

Namun, ada sebagian anak perempuan yang menikah terlambat, karena mereka memilih untuk bekerja di luar Kabupaten Karawang. Dengan bekerja mereka mampu menopang kehidupan ekonomi keluarga, sehingga memutuskan tidak menikah sedini mungkin

2. Perbedaan Peranan dalam Keluarga

Semenjak masa kecil dahulu, para informan mengakui bahwa ada perbedaan peranan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak perempuan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Majalaya. Anak perempuan semenjak kecil telah ditanamkan nilai-nilai dan kewajiban sebagai pihak yang mengurus urusan rumah tangga. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh para orang tua telah memperkenalkan ketidaksetaraan gender bagi anak perempuan. Dengan mengajarkan

bahwa anak perempuan bertanggung jawab untuk urusan dalam rumah tangga, maka membentuk persepsi dan berkembang menjadi tradisi bahwa setiap perempuan tempat beraktivitasnya adalah di rumah.

Sementara laki-laki memiliki kebebasan, karena semenjak kecil telah diberikan kebebasan oleh orang tua untuk bermain di luar rumah. Kondisi inilah yang mempengaruhi munculnya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Majalayan Kabupaten Karawang dari dahulu sampai dengan sekarang.

3 Peranan Perempuan Saat Ini

Menurut para informan, saat ini mereka selain mengurus urusan rumah tangga, juga terlibat dalam beberapa kegiatan sosial di desa masing-masing, seperti arisan, pengajian dan ikut perkreditan. Ada juga informan yang tetap bekerja walaupun sudah menikah dan punya anak, dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Adapun untuk kegiatan pengurusan anak dan rumah tangga, tetap menjadi tugas perempuan. Demikian juga halnya dengan pola pengambilan keputusan tidak berbeda jauh dengan ketika para informan masih sekolah dulu. Dalam rumah tangga, suami tetap menjadi pihak utama pengambil keputusan.

Pada intinya, terdapat kesamaan perlakuan terhadap perempuan, antara masa ketika para informan bersekolah dulu dengan masa sekarang, ketika mereka telah menjadi ibu rumah tangga. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suami masih tetap menjadi aktor utama dalam rumah tangga yakni dalam hal sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan.
2. Urusan pengasuhan anak dan perencanaan pendidikan diserahkan

- kepada istri, karena menurut persepsi suami masalah tersebut adalah urusan perempuan sebagai ibu rumah tangga, termasuk keberlanjutan pendidikan anak-anak.
3. Saat ini kegiatan tambahan perempuan di luar rumah adalah mengikuti kegiatan sosial seperti pengajian, arisan dan perkreditan. Namun ada juga yang bekerja di pabrik untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi mayoritas suami, tetap menginginkan istri berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.
 4. Secara keseluruhan, ketidaksetaraan gender masih ditemui di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, termasuk di dalam bidang pendidikan. Tradisi menikah di usia muda, sampai dengan saat ini tetap menjadi faktor dominan anak perempuan banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Hubungan Nilai terhadap Terbentuknya Stereotip Bagi Perempuan

Pada penelitian ini ditemukan satu faktor penting yang mendorong terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya, yaitu nilai. Nilai yang diwariskan secara turun temurun tersebut, dan masih diterapkan sampai dengan saat ini telah membentuk stereotip negatif yang merugikan anak perempuan. Pandangan gender yang masih keliru karena pengaruh nilai menciptakan stereotip bagi anak perempuan di Kecamatan Majalaya. Nilai yang berkembang semenjak dulu dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Majalaya yakni sebagai berikut:

1. Perbedaan peranan telah diterapkan semenjak kecil terhadap anak laki-laki dan perempuan di masyarakat Kecamatan Majalaya. Anak perempuan telah dibiasakan

untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci dan membantu tugas ibu yang lain.

2. Dampak dari pencitraan di atas adalah, masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, sehingga ketika secara biologis sudah layak menikah, maka anak perempuan yang masih usia sekolah akan disuruh menikah oleh orang tuanya. Menikah di usia muda telah menjadi tradisi turun temurun yang didukung oleh tuntutan orang tua serta perasaan malu pada anak perempuan kalau tidak menikah di usia muda.
3. Tradisi menikah muda ini berkaitan erat dengan stereotip yang berkembang di masyarakat pedesaan yakni: “Untuk apa anak perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia ke dapur juga”. “Untuk apa perempuan disekolahkan (tinggi-tinggi), nanti dia akan menjadi milik orang lain juga”. Akibatnya, dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, selalu memprioritaskan anak laki-laki. Jika ada keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak perempuan tidak terlepas dari motif dan keinginan untuk memperbaiki hidup, karena diharapkan akan mendapatkan suami yang berpendidikan juga, sehingga akan memperbaiki kehidupan keluarga.

Beberapa nilai tersebut dalam perkembangannya, terus dipertahankan, dan menciptakan struktur sosial yang tidak berpihak kepada perempuan. Nilai-nilai yang pada akhirnya menciptakan stereotip negatif bagi perempuan yakni pemberian citra baku atau label/cap kepada kaum perempuan didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Stereotip yang telah berkembang puluhan tahun tersebut, dalam kehidupan sehari-hari seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan terhadap perempuan, terutama anak perempuan. Pelabelan tersebut menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang

timpang atau tidak seimbang dilakukan atas dasar anggapan gender.

4. Salah satu jenis sumber utama terciptanya stereotip adalah nilai yang terbentuk berdasarkan tradisi dan pandangan gender.

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber pada stereotip yang dilekatkan pada mereka. Pembedaan identitas berdasarkan gender tersebut telah ada jauh sebelum seseorang itu lahir. Sehingga ketika pada akhirnya dilahirkan ke dunia ini, sudah langsung masuk ke dalam satu lingkungan yang menyambutnya dengan serangkaian tuntutan peran gender. Sehingga seseorang terpaksa menerima identitas gender yang sudah disiapkan untuknya dan menerimanya sebagai sesuatu hal yang benar, yang alami dan yang baik. Akibatnya jika terjadi penyimpangan terhadap peran gender yang sudah menjadi bagian dari landasan kultural masyarakat dimana dia hidup, maka masyarakat pun lantas menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif bahkan mungkin sebagai penentang terhadap budaya yang selama ini sudah mapan.

Semua stereotip mengenai perempuan tersebut, pada akhirnya menciptakan ketidakadilan gender, terutama dalam bidang pendidikan. Anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya juga akan ke dapur, menyebabkan ketika harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anak, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Salah satu penyebab ketimpangan gender itu adalah pandangan terhadap laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat maupun keluarga, di Kecamatan Majalaya. Pengaruh stereotip ini begitu besar dan kuat, sehingga tidak mudah untuk diubah, bahkan sudah dianggap sebagai kebenaran umum. Bias gender dimulai

dari keluarga, orang tua sudah mulai membedakan pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan.

Bias gender akibat stereotip sering kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan seperti pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai tidak produktif. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni pekerjaan domestik itu. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki.

Pandangan kultural yang mengutamakan anak laki-laki, baik sebagai penerus keluarga maupun sebagai pencari nafkah. Ketidaksetaraan ini muncul juga karena dipengaruhi oleh pemikiran bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga anak laki-laki selalu diberikan prioritas untuk melanjutkan pendidikan, termasuk di Kecamatan Majalaya. Stereotip inilah yang memicu terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya.

Hubungan Stereotip terhadap Marjinalisasi Perempuan dalam Pendidikan

Marjinalisasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan ditemukan di Kecamatan Majalaya semenjak dulu sampai dengan sekarang. Marjinalisasi dalam pendidikan merupakan suatu proses peminggiran akibat

perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan. Faktor awal yang mendorong terjadinya marjinalisasi adalah stereotip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Majalaya. Dalam konteks ini terlihat bahwa, marjinalisasi terjadi karena adanya kekeliruan dalam menggunakan asumsi gender. Anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua dalam masyarakat di sana, telah menyebabkan anak-anak perempuan usia sekolah mendapatkan ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan.

Stereotip gender yang berkembang di masyarakat Majalaya telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya, penilaian berdasarkan stereotip inilah yang terus memarjinalkan kaum perempuan dalam konteks keberlanjutan dalam bidang pendidikan ditambah dengan minimnya akses terhadap pendidikan, partisipasi yang rendah, kontrol yang kurang menguntungkan bagi perempuan serta minimnya manfaat yang didapat dari pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan anak perempuan di Majalaya termarjinalkan dalam pendidikan. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

Hubungan Stereotip terhadap Pensekunderan Perempuan dalam Pendidikan

Subordinasi terhadap perempuan merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dalam kerja reproduktif (pengasuhan dan perawatan keluarga) dan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai peran yang rendah dan laki-laki merasa tabu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu dalam bidang pendidikan anak laki-laki didahulukan dari perempuan, karena anggapan perempuan

setelah menikah tidak bekerja lagi dan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga serta bertanggung jawab dalam kerja reproduktif.

Pandangan berlandaskan gender juga ternyata bisa mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan yang berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari posisi laki-laki. Penilaian tersebut dipengaruhi oleh persepsi yang mensubordinasi perempuan. Subordinasi adalah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain. Subordinasi ini didasari adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Stereotip telah membentuk persepsi masyarakat tersebut semakin melemahkan posisi perempuan.

Pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender telah mendatangkan ketidakadilan gender bagi perempuan yang termanifestasi dalam berbagai wujud dan bentuknya. Masalah pensubordinasian gender atau pemilahan peran sosial laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya melalui pembiasaan, sosialisasi, budaya dan pewarisan budaya sejak anak dilahirkan ke dunia yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Perempuan diharuskan untuk patuh pada kodrat yang telah ditentukan oleh masyarakat untuknya. Karena diskriminasi pula perempuan harus menerima stereotip yang dilekatkan pada dirinya yaitu bahwa perempuan itu irrasional, lemah, emosional dan sebagainya sehingga kedudukannya pun selalu subordinat terhadap laki-laki, tidak dianggap penting bahkan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan diasumsikan harus selalu menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki. Akibatnya, dalam bidang pendidikan

pun, perempuan harus mendahulukan laki-laki dalam meraih kesempatan pendidikan semenjak dahulu sampai dengan saat ini. Pada masyarakat Majalaya hal ini diperkuat karena minimnya akses terhadap pendidikan, rendahnya partisipasi serta kontrol yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

Hubungan Stereotip terhadap Beban Kerja bagi Perempuan

Pemapanan citra bahwa seorang perempuan itu lebih cocok berperan dengan segala macam tugas domestiknya yang selalu dikatakan sebagai urusan perempuan, seperti membersihkan rumah, mengurus suami dan anak, memasak, berdandan dan sebagainya. Sementara citra laki-laki, disosialisasikan secara lebih positif, dimana dikatakan bahwa laki-laki karena kelebihan yang dimilikinya maka lebih sesuai jika dibebani dengan urusan-urusan laki-laki pula dan lebih sering berhubungan dengan sektor publik, seperti mencari nafkah, dengan profesi yang lebih bervariasi daripada perempuan. Dampaknya adalah di bidang pendidikan, anak laki-laki lebih mendapat prioritas, karena dinilai akan mampu memberikan imbal balik biaya pendidikan yakni gaji atau pendapatan dari dunia kerja, dibandingkan dengan anak perempuan. Laki-laki di lingkungan publik cenderung untuk memperoleh posisi atau jabatan dan gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian, orang tua menganggap lebih menjanjikan untuk menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan.

Penerapan beban kerja bagi perempuan juga dialami oleh anak perempuan di kalangan keluarga di Kecamatan Majalaya. Semenjak SD sampai dengan SMA telah diberikan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengepel dan sebagainya. Sementara anak laki-laki tidak diberikan kewajiban untuk mengerjakan

pekerjaan-pekerjaan tersebut. Anak laki-laki hanya membantu orang tua di sawah, kebun, ladang atau bertukang. Beban kerja adalah pembagian tugas/tanggung jawab yang memberatkan bagi kaum perempuan di Kecamatan Majalaya. Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, anak-anak perempuan memperoleh beban ganda, yakni selain mengerjakan tugas-tugas sekolah, juga berkewajiban mengerjakan tugas-tugas rumah tangga bahkan membantu orang tua mencari nafkah.

Seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari di dalam rumah, tidaklah dianggap “bekerja” karena pekerjaan yang dilakukannya, seberapapun banyaknya, dianggap tidak produktif secara ekonomis. Ketika seorang perempuan “bekerja” pun (dalam arti di sektor publik) maka penghasilannya hanya dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan saja sebagai penghasilan seorang suami tetap yang utama, sehingga dari segi nominal pun perempuan lebih sering mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada kaum laki-laki. Apabila perempuan bekerja dalam sektor publik hal itu pun tidak mengurangi beban kerja yang diterimanya bahkan menambah bebannya menjadi *triple role (triple burden)* meliputi peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan 1). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan di Kecamatan Majalaya disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai

terhadap pendidikan, 2). Nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat di Kecamatan Majalaya sejak dulu sampai sekarang telah membentuk stereotip yang merugikan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya adalah tradisi dan perlakuan orang tua terhadap anak perempuan. Adanya tradisi menikah di usia muda menyebabkan banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. 3). Kebiasaan yang berkembang di masyarakat perdesaan seperti di Kecamatan Majalaya menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain yang menimbulkan marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. Kondisi ini terlihat dari partisipasi yang dominan dari laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 4). Beban kerja ganda telah disosialisasikan oleh orang tua kepada anak perempuan dan laki-laki semenjak kecil. Pengenalan pola pembagian kerja ini, membentuk persepsi yang keliru mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan sebagai berikut: 1). Dalam setiap keluarga perlunya diberikan peningkatan kesadaran, melalui kegiatan sosialisasi dari badan pemberdayaan perempuan yang bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dengan cara diskusi atau pengarahan. 2). Perlu meningkatkan kuota kesempatan kerja pada perempuan, hal ini diperlukan untuk menunjang sosialisasi yang sudah disampaikan kepada keluarga sehingga mendapat respon positif dari masyarakat. 2). Dalam konteks sekolah, perlu memberikan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu, dengan prioritas untuk anak perempuan, karena anak perempuan

perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki dalam bidang pendidikan. 3). Penyuluhan melalui dinas pendidikan, dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan mengenai hak-hak perempuan, selain itu dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian atau perayaan hari-hari besar keagamaan, pihak aparat desa dapat memberikan porsi peranan yang lebih banyak kepada kaum ibu dan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, (2009). *Analisa Pendidikan*. Karawang.
- Bradley, H. (2007). *Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Faisal, Sanafiah. (1991). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Insist Press.
- Grewal, I., & Kaplan, C. (2002). *An introduction Women's Studies*, New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Joesoef, Soelaiman. (1979). *Pendidikan Luar Sekolah*, Surabaya : CV Usaha Nasional.
- Moore, H L. (1998). *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moser, CON. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*, London : Routledge
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar.
- Nasution, S. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nurhaeni, I. D. (2009). *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Surakarta: UNS Press.
- Ostergaard, L. (1992). *Gender and Development Apractical Guide*, New York: Routledge.
- Suleeman, E. (1995). *Pendidikan Wanita di Indonesia*, Dalam T. O. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (hal. 227-248). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supiandi, Yusuf. (2001). *Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender*, Jakarta: Kantor Meneg PP.
- Suryadi, A. (2001). *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*, Jakarta: Bappenas & WSPII-CIDA.
- Suryadi, A, & Idris, E. (2004). *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: PT. Ganesindo.
- Unger, R., & Crawford. (1992). *Women and Gender a Feminist Psychology*, New York: McGraw_Hill Inc.
- Van Bemmelen, S. (1995). *Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru? Dalam T. Ihromi, Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (hal. 175-226). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2009). *Beijing Platform For Action*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.